

**KINERJA PT RAPP DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN MELALUI *FIRE FREE VILLAGE PROGRAM (FFVP)* DI KECAMATAN MERBAU, KEPULAUAN MERANTI**

**Oleh : Koniah**

*Koniah1996@gmail.com*

**Pembimbing : Dr. Harapan Tua, RFS, M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

***Abstract***

*Disaster land and forest fires are a serious problem that must faced in Riau Province nearly every year during the dry season. as part of efforts to reduce the level of forest fire in the area around PT, PT RAPP units APRIL GROUP Company initiated Fire Free Village Program ( FFVP) which began in 2015. The aim of this study is to explain how the performance of PT RAPP in prevention through FFVP in District Merbau, Meranti Islands. And explain what are the factors supporting PT RAPP performance in the prevention of forest fires and land through FFVP in District Merbau, Meranti Islands. The concept of the theory is the measurement of organizational performance by Muhammad Mahsun in (Lijen Poltak Sinambela, 2016) consisting of: set goals, objectives and strategies, formulate indicators / measures of performance, achievement of the objectives, performance evaluation. The method used is a qualitative research with case study approach, the selection of informants using purposive sampling technique. The technique of collecting data through observation, interviews and documentation. The results of this study explained that the performance of PT RAPP in the prevention of forest fires and land in the District Merbau is optimal, this is evidenced by the level of land and forest fires decreased even within the last 2 years did not fire. it is not independent of the supporting factors such as community participation, budget, socialization and communication.*

**\* *Keywords* :***Organizational Performance, Prevention, Programs*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan serius yang harus dihadapi di Provinsi Riau hampir setiap tahun pada saat musim kemarau. Mayoritasnya kebakaran hutan dan lahan terjadi dilahan gambut dan areal konsensi perusahaan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri yang memproduksi diatas lahan gambut. Kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan bencana asap dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kebakaran didukung oleh pemanasan global, kemarau ekstrim yang sering kali dikaitkan dengan pengaruh iklim yang memberikan kondisi ideal untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dan juga akibat aktivitas manusia dalam pengelolaan lahan.

Untuk melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau, Pemerintah membentuk PUSDALKARHUTLA yang merupakan peraturan yang dibentuk oleh Peraturan Gubernur Riau No. 11 Tahun 2014. Peraturan Gubernur tersebut menjelaskan “bahwa setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan pembakaran lahan, hutan, atau biomassa hasil tebas/tebang yang dapat menimbulkan dampak terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup”.

( Pasal 8 Bagian Pertama Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 ).

Kabut asap pada status darurat asap dalam kurun waktu terakhir sulit dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Pada tahun 2015 terjadi kebakaran hutan dan lahan dengan jangka waktu paling lama

dibandingkan tahun sebelumnya. World Bank mencatat kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan ini mencapai 20 triliun rupiah. MoEF dan BNPB mencatat bahwa paa tahun 2015 lahan terbakar di Riau mencapai 186.096 hektar. Diantara luas lahan tersebut, sekitar 107.000 hektar merupakan lahan gambut. Hal ini juga menyebabkan dampak kabut asap yang pekat menyelimuti kota-kota di 12 Kabupaten yang berada di Riau.

Dalam wujud keseriusan Pemerintah Daerah terkait dalam rangka antisipasi dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Pemerintah Daerah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari kepolisian, TNI, Kejari, Imigrasi, dan Tokoh masyarakat Peduli Api (MPA). Pembentukan Tim Satgas Siaga Darurat ini menimbang kebakaran hutan dan lahan yang pada umumnya terjadi pada areal gambut sangat sulit untuk dipadamkan dan berpotensi menimbulkan bencana kabut asap. Namun faktanya pencegahan dan kebakaran yang dilakukan belum diberdayakan secara maksimal, dan cenderung hanya difungsikan pada saat terjadinya peristiwa kebakaran hutan dan lahan.

PT RAPP unit perusahaan APRIL GROUP menggagas program ‘Desa Bebas Api’ atau *Fire Free Village Program (FFVP)*, yang dimulai pada tahun 2015. APRIL memberikan penghargaan kepada desa-desa partisipan yang tidak melakukan praktik pembakaran untuk membersihkan lahan. Namun, penghargaan tersebut bukanlah satu-satunya yang ditonjolkan dalam FFVP

ini. Program FFVP dikembangkan berdasarkan lima filosofi, yaitu:

1. Penghargaan Desa Bebas Api
2. Bantuan masyarakat Pertanian Berkelanjutan
3. Kru Pemimpin Desa
4. Komunitas sadar api
5. Pemantauan kualitas udara

Strategi PT RAPP anak Perusahaan APRIL GROUP berkomitmen terhadap program pengembangan masyarakat lokal melalui keterlibatan masyarakat, bantuan ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur. FFVP adalah rencana pencegahan kebakaran yang komprehensif pertama di Riau yang bertujuan untuk mencegah kebakaran dengan cara berkolaboratif mengatasi akar penyebabnya dengan masyarakat, baik bagi Negara, baik bagi iklim, baik bagi pelanggan dan baik bagi perusahaan.

dalam kurung waktu 4 tahun terakhir Kecamatan Merbau mengalami tingkat penurunan kebakaran hutan dan lahan. Kinerja PT RAPP dalam Melakukan pembukaan lahan tanpa bakar dalam program FFVP ternyata menunjukkan keberhasilan. Terbukti dengan adanya sejumlah desa berkomitmen menjaga desanya dengan menerapkan desa zero api, selain itu mereka juga melakukan patroli pantauan udara disetiap desa dengan satu koordinator penggerak yang juga melakukan sosialisasi keseluruhan lapisan masyarakat dan sekolah-sekolah akan dampak bahaya dari kebakaran hutan dan lahan melalui kegiatan *Fire Aware Community (FAC)*.

Dalam implemenasinya program FFVP yang menjadi fokus utama yakni *Fire Aware Community (FAC)* dengan konsep penyadaran dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, dan dampak bahaya kabut asap. Dalam *FAC* program yang dilaksanakan yakni *Fire Free Goes to School* dan *Fire Free Goes to the Movies*, Dengan tujuannya :

1. Terciptanya lingkungan yang sehat bebas dari api dan asap
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan
3. Mendesak peran aktif masyarakat dan pemerintah desa dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
4. Memberikan alternative lain dalam penyiapan lahan pertanian tanpa menggunkan api
5. Mengubah pola pikir masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar sejak usia dini.

Berdasarkan dari latar belakang dan masalah yang telah peneliti uraikan diatas, yang mendasari asumsi penelitian bahwa peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana kinerja PT RAPP dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui *FFVP* yang telah di kembangkan, sehingga peneliti membuat judul "Kinerja PT RAPP Dalam Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Melalui *Fire Free Village*

*Program (FFVP) Di Kecamatan Merbau, Kepulauan Meranti”.*

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja PT RAPP dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui *FFVP* di Kecamatan Merbau, Kepulauan Meranti ?
2. Apa faktor-faktor pendukung kinerja PT RAPP dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Merbau, Kepulauan Meranti ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisa kinerja PT RAPP dalam upaya melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui *FFVP* di Kecamatan Merbau, Kepulauan Meranti.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung kinerja PT RAPP dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Merbau, Kepulauan Meranti.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis  
Penelitian Ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang telah di lakukan oleh PT RAPP, sehingga akan menjadi bahan masukan dan alternatif pemerintah dalam

upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang selalu terjadi di Provinsi Riau.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian Ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang telah di lakukan oleh PT RAPP, sehingga akan menjadi bahan masukan dan alternatif pemerintah dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang selalu terjadi di Provinsi Riau.

## 2. KONSEP TEORI

### 2.1 Kinerja Organisasi

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (per-individu) dan kinerja organisasi. kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan /program kebijakan dalam mewujudkan sasaran,tujuan, misi, visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan, kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu (Mahsun, 2006)

Menurut (Subandi, 2006)

Kinerja organisasi merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan *input, output, outcome, benefit*, maupun *impact*.. Adanya hasil kerja yang dicapai oleh instansi dengan penuh tanggung jawab akan tercapai peningkatan kinerja yang

efektif dan efisien. indikator kinerja organisasi sebagai berikut:

- a. Keluaran (Output)
- b. Hasil
- c. Kaitan Usaha dengan Pencapaian
- d. Informasi Penjelas

Kinerja organisasi didefinisikan juga sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai tujuannya secara efektif (**Nasucha, 2015**)

Kinerja dalam lingkup organisasi adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi dalam melakukan suatu pekerjaan dapat dievaluasi tingkat kinerjanya. Berhasil tidaknya tujuan dan cita-cita dalam organisasi tergantung bagaimana proses kinerja itu dilaksanakan. Kinerja organisasi tidak lepas dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi:

1. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi
2. Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi
3. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, dan kebersihan
4. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola

kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan

5. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi
6. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi dan lainnya (**Ruky, 2011**)

Pengukuran kinerja organisasi harus dilakukan dengan prinsip-prinsip yang baik dan benar. Menurut **Mahsun** dalam (**Sinambela, 2016**) Beberapa aspek yang mendasar dan paling pokok dari pengukuran kinerja sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi dengan menetapkan secara umum apa yang diinginkan organisasi sesuai dengan tujuan, visi dan misinya.
2. Merumuskan indikator kinerja dan ukuran kinerja, yang mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung yang berbentuk keberhasilan utama dan indikator kunci.
3. Mengukur tingkat capaian tujuan, dan sasaran organisasi, menganalisis hasil pengukuran kinerja yang dapat diimplementasikan dengan membandingkan tingkat capaian tujuan, dan sasaran organisasi.
4. Mengevaluasi kinerja dengan menilai kemajuan organisasi dengan mengambil keputusan yang berkualitas, memberikan

gambaran atau hasil kepada organisasi seberapa besar tingkat keberhasilan tersebut dan mengevaluasi langkah apa yang diambil organisasi selanjutnya.

5.

## 2.2 Good Governance

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur negara. Hal ini karena pemerintah merancang konsep prinsip-prinsip *good governance* untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, di samping itu masyarakat masih menganggap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pasti cenderung lamban, tidak profesional, dan biayanya mahal.

Menurut **Sadjijono** dalam **Maryam (2016)** *good governance* mengandung arti: “Kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara”. Sedangkan menurut **IAN & BPKP** dalam **Maryam (2016)** yang dimaksud dengan *good governance* adalah: “Bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan”. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, merumuskan arti *good governance* sebagai berikut: “Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas,

supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”

Dari definisi-definisi yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *good governance* mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial-budaya, politik, dan ekonomi

Menurut dokumen **United Nations Development Program (UNDP)** dalam **Maryam (2016)**, tata pemerintahan adalah: “Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat”. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme proses dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Namun untuk ringkasnya, *good governance* pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata ‘baik’ di sini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*.

Berdasarkan pemahaman atas pengertian *governance* tersebut, maka penambahan kata sifat *good* dalam *governance* bisa diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik atau positif.

Letak sifat baik atau positif itu adalah manakala ada pengalihan sumber daya secara maksimal dari potensi yang dimiliki masing-masing aktor tersebut atas dasar kesadaran dan kesepakatan bersama terhadap visi yang ingin dicapai. *Governance* dikatakan memiliki sifat-sifat yang *good*, apabila memiliki ciri-ciri atau indikator-indikator tertentu

### **2.3 Fire Free Village Program (FFVP)**

Program FFVP merupakan upaya perusahaan dalam mencegah kebakaran yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar mengenai dampak negatif dari kebakaran lahan dan hutan di Riau. FFVP terdiri dari tiga tahapan program yang mendukung masyarakat sekitar untuk meningkatkan kemampuan sosial dan ekonomi tanpa menggunakan metode tradisional seperti membuka lahan dengan membakar. Tiga tahapan tersebut yaitu: Desa Peduli Api, Desa Bebas Api, dan Desa Tangguh Api.

1. Masyarakat Peduli Api
2. Desa Bebas Api
3. Desa Tangguh Api

### **2.4 Kebakaran Lahan dan Hutan di Provinsi Riau**

Pengendalian kebakaran lahan dan hutan dimulai dalam tiga tahapan yaitu pencegahan, penanggulangan (pemadaman) serta pemulihan sesuai dengan cerminan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur No 11 Tahun 2014 Tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Hutan Provinsi Riau yang kemudian di sempurnakan

dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Bencana Asap Akibat Kebakaran Lahan dan Hutan di Provinsi Riau. Ketiga tahapan tersebut mutlak menjadi tahapan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau beserta jajarannya yang terlibat dalam usaha pengendalian kebakaran lahan dan hutan di Riau.

Pencegahan kebakaran merupakan komponen pengendalian kebakaran lahan dan hutan yang meliputi semua cara untuk mengurangi atau meminimalkan jumlah titik api. Pencegahan kebakaran lahan dan hutan adalah kegiatan awal yang paling penting dalam penegndalian kebakaran dan pekerjaan yang harus dilakukan terus menerus.

Ada 7 peyebab dan akar permasalahan mengapa kebakaran hutan dan hutan terus terjadi di Provinsi Riau, antara lain :

1. Cuaca yang ekstrim,
2. Lahan gambut yang mudah terbakar,
3. Cara bercocok tanam penduduk dengan cara membakar,
4. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat sehingga melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar,
5. Tidak optimalnya pencegahan oleh aparat di tingkat bawah,
6. Kurang efektifnya pemadaman api,
7. Perbedaan sudut pandang masyarakat bahwa kebakaran yang terjadi tidak perlu diselamatkan karena tidak adanya sumber ekonomi yang diselamatkan

Berdasarkan tipe bahan bakar dan sifat pembakarannya, kebakaran lahan dan hutan dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe, yaitu :

1. Kebakaran bawah (*ground fire*) merupakan tipe kebakaran dimana api membakar bahan organik maka kebakaran ini tidak terlihat apinya namun asap. Penyebaran api juga sangat lambat dan terjadi dalam waktu yang lama (biasanya terjadi pada lahan gambut yang ketebalannya mencapai 10 meter)
2. Kebakaran permukaan (*surface fire*) yaitu tipe kebakaran dimana api membakar bahan bakar permukaan yang berupa serasah, semak belukar, anakan. Pancang, dan limbah pembalakan. Sifat api cepat merambat, nyalanya besar dan panas, namun cepat padam.
3. Kebakaran tajuk (*crown fire*) merupakan tipe kebakaran yang membakar tajuk pohon (bagian atas pohon). Kebakaran ini akan parah jika terjadi di tanaman yang daunnya mudah terbakar dan rapat.

Kebakaran lahan dan hutan antara lain karena faktor alam, biasanya terjadi pada musim kemarau ketika cuaca sangat panas dan faktor pembakaran oleh manusia. Sebab utama dari kebakaran adalah pembukaan lahan yang meliputi:

1. Pembakaran lahan yang tidak terkendali sehingga merambat

ke masyarakat maupun perusahaan. Namun bila pembukaan lahan dengan skala besar kebakaran sulit dikendalikan. Pembukaan lahan tersebut sering dilaksanakan untuk usaha perkebunan HTI, pertanian lahan kering, sonor dan mencari ikan. Pembukaan lahan yang paling berbahaya adalah didaerah rawa/gambut.

2. Konflik antara pihak pemerintah, perusahaan, dan masyarakat karena status lahan sengketa perusahaan-perusahaan kelapa sawit kemudian menyewa tenaga kerja dari luar untuk bekerja dan membakar lahan masyarakat lokal yang lahannya ingin diambil alih oleh perusahaan. Kebakaran mengurangi nilai lahan dengan cara membuat lahan menjadi terdegradasi dan dengan demikian perusahaan akan mengambil alih lahan dengan melakukan pembayaran ganti rugi yang murah bagi penduduk asli
3. Dalam beberapa kasus, penduduk lokal juga melakukan pembakaran untuk memprotes pengambilan lahan mereka oleh perusahaan
4. Tingkat pendapatan relatif rendah, sehingga terpaksa memilih alternatif yang mudah, murah, dan cepat untuk pembukaan lahan
5. Kurangnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar peraturan pembukaan lahan Faktor alam



seperti sambaran petir, dan lain-lain.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti

#### **3.3 Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu peneliti menentukan informan yang dianggap memiliki informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

1. Manajer FFVP
2. Koordinator lapangan FFVP di Kecamatan Merbau
3. Yayasan Laskar Alam yang menjadi Koordinator FFVP di Kecamatan Merbau
4. Anggota Crew Leader di setiap desa yang ikut berpartisipasi dalam FFVP
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti
6. Masyarakat setempat

#### **3.4 Jenis Data**

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Data primer dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dan observasi yang berhubungan dengan Kinerja PT RAPP dalam Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui *FFVP* di Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti

- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang relevan dengan kajian penelitian atau sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari PT RAPP dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada periode bulan September 2018 sampai dengan April tahun 2019. Penelitian ini dilakukan secara bertahap, terdiri dari :

- a. Observasi (Pengamatan)

Tenik observasi digunakan untuk melihat dan mengamati perubahan fenomena-fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut, bagi pelaksanaan observasi untuk melihat

obyek moment tertentu, sehingga mampu memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan. Teknik ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana Kinerja PT RAPP dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui *Fire Free Village Program (FFVP)* di Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. *Interview* (Wawancara)

Wawancara mendeskripsikan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara interview yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian Kinerja PT RAPP dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui *Fire Free Village Program (FFVP)* di Kabupaten Kepulauan Meranti.

c. Dokumentasi

dokumentasi merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi digunakan untuk mencari data yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan penelitian. Data tersebut diperoleh data sekunder berupa dokumen-dokumen secara tertulis, baik berupa data statistik, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang bertujuan untuk melengkapi data primer.

### 3.6 Analisa Data

Analisis data pada penelitian ini adalah melalui analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus (*case study*), sebagai berikut :

a. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.

b. *Display* data

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi di analisis kemudian disajikan dalam bentuk CW (Catatan Wawancara), CL (Catatan Lapangan), dan CD (Catatan Dokumentasi). Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi data sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Masing-masing data yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.

c. Pengambilan keputusan dan verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data dan kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

## 5. HASIL PENELITIAN

### 5.1 Kinerja PT RAPP dalam Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui *Fire Free Village Program (FFVP)*

#### 5.1.1 Mementukan Tujuan, Sasaran dan Strategi

##### a. Menetapkan tujuan

Menetapkan tujuan adalah pernyataan secara umum tentang apa yang ingin dicapai sebagai penjabaran dari visi dan misi yang telah ditentukan oleh organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya. Pada suatu organisasi ketika melakukan pelaksanaan suatu program sangat penting untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu agar kegiatan yang dilakukan jelas dan terarah. Tujuan utama PT RAPP dalam FFVP adalah *Fire Aware Community (FAC)* dengan konsep penyadaran dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, dan dampak bahaya kabut asap. Dengan tujuan lainnya:

##### a. Terciptanya lingkungan yang sehat bebas dari api dan asap

b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan

c. Mendesak peran aktif masyarakat dan pemerintah desa dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

d. Memberikan alternatif lain dalam penyiapan lahan pertanian tanpa menggunkan api

e. Mengubah pola pikir masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar sejak usia dini.

##### b. Menetapkan sasaran

Sasaran kinerja merupakan suatu pernyataan secara spesifik yang menjelaskan hasil yang harus dicapai, kapan, dan oleh siapa sasaran yang ingin dicapai tersebut diselesaikan. sasaran dalam organisasi dinyatakan secara eksplisit dengan dibatasi waktu yang jelas kapan sasaran itu akan dicapai. Selain itu dalam sasaran biasanya sudah semakin jelas karena umumnya di nyatakan secara kuantitatif, sehingga lebih mudah mengukurnya. Sasaran adalah perumusan suatu yang harus diselesaikan melalui rangkaian kegiatan. Sasaran menggambarkan sesuatu yang harus dicapai dan dijadikan target.

##### c. Menentukan strategi

Selanjutnya ditentukan strategi sebagai upaya pencapaian yang menggambarkan bagaimana mencapainya. Oleh sebab itu dalam bagian ini akan ditetapkan cara dan teknik yang akan digunakan untuk mencapainya tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan, sasaran, dan strategi dari PT RAPP dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Merbau saat ini sudah berjalan dengan baik dan optimal. Hal ini dapat dilihat dari tujuan, sasaran, dan strategi yang mereka tetapkan sudah berhasil. Kontribusi jangka pendek terhadap pengetahuan tentang pembukaan lahan tanpa bakar yang sudah dilakukan RAPP melalui sosialisasi FAC sudah menghasilkan hasil yang positif. Berdasarkan hasil dilapangan masyarakat di Kecamatan Merbau sudah mulai merubah pola pikirnya dengan melakukan pembukaan lahan tanpa membakar. Pembentukan kru yang dilakukan oleh RAPP juga sangat efektif untuk membuat penduduk lokal terlibat langsung dengan *FFVP*, serta meningkatkan kesadaran masyarakat.

### **5.1.2 Merumuskan Indikator / Ukuran Kerja**

Indikator mengacu pada penilain kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang bersifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Indikator dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi. Indikator kinerja dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama atau yang disebut *Critical success factors* dan indikator kinerja kunci atau yang disebut *key performance indicator*. Dari lima proyek *FFVP* terdapat dua indikator kinerja kunci yaitu:

1. Kontribusi jangka pendek atas pengurangan kawasan yang terbakar dan melibatkan positif dengan masyarakat.
2. Pergeseran budaya masyarakat jangka panjang, sosialisasi, dan mata pencaharian alternatif bebas kebakaran.

*FFVP* yang dilakukan oleh PT RAPP di Kecamatan Merbau dilaksanakan bekerja sama dengan Yayasan Laskar Alam (yang berbasis di Pulau Padang) untuk membantu berkomunikasi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat, dan menumbuhkan kesadaran Bebas Api di Kecamatan Merbau. Pada tahun 2016, *FFVP* diperluas mencakupi :

1. Masyarakat Sadar Api dengan tahap awal sosialisasi, pembangunan hubungan, program kesadaran sekolah, dan keterlibatan sebelum desa memasuki *FFVP*
2. Program *FFVP* dan Lima proyeknya seperti yang telah diuraikan diatas; setelah dua tahun di *FFVP*, dengan desa-desa yang telah lulus lanjut ke tahap ketiga
3. Masyarakat Tangguh Api yang merupakan suatu peraturan yang lebih fleksibel dengan anggaran dan tingkat keterlibatan yang lebih rendah karena masyarakat mengembangkan kemampuan internal.

### **5.1.3 Ketercapaian Tujuan**

Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang

telah ditetapkan. Analisis antara hasil actual dengan indikator dan ukuran kinerja ini biasanya menghasilkan penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Penyimpangan positif berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai serta melampaui indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Sementara penyimpangan negatif berarti pelaksanaan kegiatan belum berhasil mencapai indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan.

berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat diketahui bahwa pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui *FFVP* sudah menunjukkan keberhasilan. Keberhasilan ini tercapai berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi yang sudah ditetapkan serta indikator/ukuran kinerjanya. hal ini juga dilihat dari tingkat kebakaran hutan dan lahan yang menurun dan pola pikir masyarakat yang sudah berubah. Bahkan desa-desa yang ikut berpartisipasi dalam *FFVP* mendapatkan reward Rp.100.000.000 dari RAPP sebagai bentuk penghargaan karena sudah berkomitmen menjaga desanya dari kebakaran hutan dan lahan.

#### **5.1.4 Evaluasi Kinerja**

Evaluasi kinerja merupakan suatu proses penilaian kinerja aparatur yang dilakukan untuk melihat tanggung jawab pekerjaannya. Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan setiap periode tertentu, sangat bermanfaat untuk

menilai kemajuan yang telah dicapai organisasi. Kriteria yang digunakan untuk menilai kemajuan organisasi ini adalah dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan membandingkan hasil aktual yang tercapai dengan tujuan organisasi yang dilakukan secara berkala. Dalam organisasi yang sehat, perbaikan kinerja secara terus menerus menjadi keharusan.

### **5.2 Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui *Fire Free Village Program (FFVP)* di Kecamatan Merbau, Kepulauan Meranti**

#### **5.2.1 Anggaran**

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun. Tidak ada satupun organisasi atau lembaga memiliki anggaran yang tidak terbatas, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi hal penting dalam sebuah proses perencanaan. Dalam hal jumlah anggaran yang di anggarkan dalam setahun yang dialokasikan dari RAPP untuk program *FFVP* di nilai sudah mencukupi.

anggaran yang dialokasikan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam *FFVP* yang dilakukan oleh PT RAPP di Kecamatan Merbau, Kepulauan Meranti sudah sesuai dengan harapan dan kebutuhan, karena pada dasarnya anggaran sangat diperlukan untuk menunjang kinerja PT RAPP agar dapat berjalan sebagaimana fungsinya, anggaran juga sangat berperan penting sebagai berjalannya program yang

telah direncanakan. Jika anggaran yang ada sesuai dan dapat dipertanggung jawabkan maka perencanaan kerja dalam setahun akan cukup, tetapi jika anggaran kurang memadai maka proses pelaksanaan program yang ada akan terhambat dan tidak tercapai sepenuhnya.

### **5.2.2 Ketersediaan Sarana dan Prasarana**

Pelaksanaan program tidak akan berlangsung dengan lancar dan baik jika tanpa adanya suatu sarana atau fasilitas yang mendukungnya. Tersedianya sarana dan prasarana kerja adalah salah satu indikator dalam kinerja organisasi adalah kemampuan bekerja produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung dalam kinerja PT RAPP melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui *FFVP*. Dengan adanya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik sangat diperlukan dalam sebuah organisasi.

### **5.2.3 Komunikasi**

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi dan sangat berpengaruh dalam menentukan efektif atau tidaknya kinerja suatu organisasi. Dalam hal ini PT RAPP melakukan komunikasi dengan kolaborasi dengan Pemerintah dan masyarakat dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Seperti yang kita ketahui bahwa PT RAPP membentuk tim crew leader disetiap desa yang bertujuan untuk melakukan patroli

aktif dalam menjaga desanya dari kebakaran. Komunikasi harus selalu dilakukan terutama ketika memasuki musim kemarau, maka crew leader diharapkan siap siaga disekitar kawasan rawan api. Dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, PT RAPP tidak berdiri sendiri, tetapi juga berada di bawah naungan pemerintah di Kepulauan Meranti, serta berkoordinasi dengan pihak lainnya seperti Kepolisian dan juga dengan Masyarakat yang peduli akan lingkungan yaitu Yayasan Laskar Alam. Oleh karena itu, komunikasi harus terjalin dengan berbagai pihak alam mendapatkan laporan dalam penanganan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Merbau.

### **5.2.1 Partisipasi Masyarakat**

Pada intinya pelaksanaan suatu program diperuntukkan untuk masyarakat dan oleh karenanya masyarakatlah yang memerlukan pelayanan. Keberhasilan tergantung pada tipe macam apa partisipasi masyarakat dalam proses penerapannya. Artinya, sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap suatu program sehingga ia turut berpartisipasi. Keberhasilan *FFVP* di Kecamatan Merbau tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang mendukung.

## **6. Penutup**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dijelaskan dalam bab V, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Kinerja PT RAPP Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Melalui *Fire Free Village Program (FFVP)* Di Kabupaten Kepulauan Meranti dilihat dari 4 indikator pengukuran kinerja organisasi menurut Muhammad Mahsun yaitu: 1. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi, 2. Merumuskan indikator/ukuran kinerja, 3. Ketercapaian tujuan, 4. Evaluasi Kinerja. Maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja PT RAPP Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui *Fire Free Village Program (FFVP)* Di Kecamatan Merbau, Kepulauan Meranti sudah berjalan dengan baik, dan optimal. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui *FFVP* menunjukkan tingkat keberhasilan dengan tidak adanya kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Merbau dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Konsep penyadaran kepada masyarakat yang dilakukan oleh PT RAPP juga menunjukkan keberhasilan dengan tidak adanya masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar. Hal ini membuktikan bahwa kinerja PT RAPP sudah berjalan dengan baik dan optimal. Hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi seperti sosialisasi yang terus menerus untuk memberikan kesadaran masyarakat yang tidak bisa dilakukan hanya sekali dan perlu berulang kali untuk

memaksimalkan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Faktor-faktor pendukung Kinerja PT RAPP Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui *Fire Free Village Program (FFVP)* Di Kecamatan Merbau, Kepulauan Meranti diantaranya ialah faktor Anggaran, Komunikasi, Ketersediaan sarana dan prasarana dan Partisipasi masyarakat.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, penulis memberikan saran dan masukan-masukan sebagai berikut :

1. Kinerja PT RAPP dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui *Fire Free Village Program (FFVP)* di Kecamatan Merbau, Kepulauan Meranti upaya yang perlu dipertimbangkan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara terus-menerus agar masyarakat lebih memahami tentang bahaya dan dampak kebakaran hutan dan lahan, sehingga masyarakat bisa lebih mandiri dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
2. Upaya yang perlu dipertimbangkan adalah dari pihak pemerintah, yang masih terdapat kekurangan dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih belum optimal. Agar

segera memperbaiki kondisi tersebut dan melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Masyarakat diharapkan mampu memahami tentang bahaya dan dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, merubah pola pikir tentang membuka lahan dengan cara dibakar karena hal tersebut merupakan salah satu penyebab dari kebakaran yang terjadi di Kecamatan Merbau.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustinova, D. E. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Edisi Keempat). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dwiyanto, Agus.2012. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Emzir. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Depok: Rajawali Pers.
- Fahmi, Irfan. (2015). *Manajemen Kinerja: Teori dan Aplikasinya*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, M. S. (2015). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hendriani, Susi dan Yohanas Omar. (2011). *Kinerja dan Kepuasan Kerja*. Pekanbaru.
- Moehariono. (2014). *Pengukuran Kinerja: Berbasis Kompetensi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. (2014). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor*



- Publik. BPFE Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- Mangkunegara, Anwar. (2014). *Evaluasi Kinerja SDM. Bandung: PT Aditama.*
- Nasution, Mimin Sundari. 2016. *Perilaku Organisasi. UR Press: Pekanbaru.*
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik, Bandung: Alfabeta*
- Sinambela, L.P. (2016). *Kinerja Pegawai: Teori Pengukuran dan Implikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.*
- Sinambela, L.P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara.*
- Siswanto, H. B. (2016). *Pengantar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.*
- Sutrisno, Edi. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana.*
- Stephen P. Robbins dan Timothy A Judge. 2015. *Perilaku Organisasi. Terjemahan oleh Ratna Saraswati dan Febriella Sirait. Salemba Empat: Jakarta.*
- wibowo. 2011. *Manajemen Kinerja. Jakarta: Raja Grafindo Persada.*
- Wibowo. 2015. *Perilaku Dalam Organisasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*
- Waliadi, Suhada. (2005). *Mengelola Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan. Palangkaraya: CARE Internasional Indonesia.*
- Jurnal :**
- Irwandi,dkk. 2016. *Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur. Jurnal AGRIFOR Fakultas Pertanian. Volume XV No II, Oktober 2016. (<https://journal.unnes.ac.id>)*
- Ajriansyah,dkk. 2018. *Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus: Kecamatan Bukit Batu, Kab. Bengkalis). Jurnal Fakultas Kehutanan. Vol.13 No.1, Januari 2018. (<https://journal.unilak.ac.id>)*
- Suhendri. 2017. *Penguatan Kelembagaan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan. Vol. 4 No. 1. Februari 2017. (<https://journal.umy.ac.id>)*
- Lailan Syaufina. 2013. *Kearifan Lokal Masyarakat Adat dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Kasus Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar Desa Sinaresmi, Kecamatan Cisolak, Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat). Jurnal Silviculture Tropika. Vol. 04 No. 3.*

Desember 2013  
(<https://jurnal.ipb.ac.id>)

**Dokumen :**

1. Peraturan Gubernur No 11 Tahun 2014 Tentang Pusat Pengendalian Hutan dan Lahan Provinsi Riau
2. Panduan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Desa di Areal Gambut Seri-1 Program Pencegahan Kebakaran Berbasis Desa
3. Intruksi Presiden Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Laha